

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Edi Subiyanto, 2019, *Hakim Konstitusi Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*, Rajawali Pers, Depok.
- Afan Gaffar, 2006, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ahmad Fadlil Sumadi, et.all., 2019, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dalam Praktik*, Rajawali Pers, Depok.
- Alexander Hamilton, et. all., 2017, *The Federalist Papers (Including Declaration of Independence & United States Constitutions)*, Madison & Adams Press.
- Anwar Usman, 2020, *Independensi Kekuasaan Kehakiman: Bentuk-bentuk dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Bagir Manan, 2006, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary: Seventh Edition*, West Group ST. Paul Minn, United States of America.
- C.F. Strong, 2019, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie ke dalam *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, Nusa Media, Bandung.
- E. Utrecht, 1990, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, PT Ichtiar Baru, Jakarta.
- Eny Kusdarini, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta.
- Feri Amsari, 2016, *Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary Sixth Edition: Definition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, ST Paul Minn West Publishing Co, United States of America.

- I Dewa Gede Palguna, 2018, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2020, *Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Imam Asmarudin dan Imawan Sugiharto, 2020, *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Dilengkapi dengan Hukum Acaranya)*, Diya Media Group, Brebes.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode &Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- _____, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- _____, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Kunthi Dyah Wardani, 2007, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Lukman Santoso, 2016, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, IAIN Po Press, Yogyakarta.
- M. Ali Safa'at, et. all., 2019, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi)*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

- Munir Fuady, 2011, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- P. H. Collin, 2004, *Dictionary of Law: Fourth Edition*, Bloomsbury Publishing Plc, London.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman: Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2021, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, Rajawali Pers, Depok.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman (Edisi Revisi)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Toni Andrianus Pito, et. all., 2022, *Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Politik sampai Korupsi*, Nuansa Cendekia, Bandung.

Widayati, 2016, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Unissula Press, Semarang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316.

Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*”, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “*Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi*”.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “*Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*”.

C. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK-SPP/II/2017

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK-SPL/II/2017

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023

Putusan Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI

D. Jurnal

Adlina Adelia, “Relevansi Pengawasan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Oleh Komisi Yudisial”, *JURNAL MAJELIS Media Aspirasi Konstitusi*, Edisi 04, 2018.

Ahmad Fadlil Sumadi, “Independensi Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 5, 2011.

Al Amin Syayidin Ali Mustopa, “Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 2, No. 2, 2022.

Al Muttaqien, “Implikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPRD Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi”, *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, Vol. 3, No. 1, 2020.

Ashari dan Riska Ari Amalia, “Konstitusionalitas Per pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat”, *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 4, No. 1, 2023.

Durohim Amnan, “Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat”, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 38, No. 1, 2023.

Elfid Nurfitra Mubarak dan Alwi Al Hadad, “Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif *Teori Checks and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan”, *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021.

Fuad Abdul Azis, “Analisis Kewenangan DPR Terhadap Polemik Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi”, *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 4, No. 1, 2023.

- Hadi Shubhan, "Recall: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No. 4, 2006.
- Ibnu Sina Chandranegara, "Penuangan Checks and Balances ke dalam Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 3, 2016.
- M. Reza Saputra dan Taufiqurrohman Syahuri, "Analisis Dampak Revisi UU Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Hakim di Indonesia", *Jembatan Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2024.
- Muhammad Reza Baihaki, et. all., "Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) Masa Jabatan Hakim Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3, 2020.
- Nike K. Rumokoy, "Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 20, No. 1, 2012.
- Nur Mila Hayya, Rosmini dan Harry Setya Nugraha, "Constitutionality of Replacing Judges Mid-Term and its Implication on the Independence of the Constitutional Court Indonesia", *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Rafly Rilandi Puasa, et. all., "Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro", *EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Rida Farida, "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya dalam Konsep Perwakilan Rakyat", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2013.
- Sabila Febriani, "Dampak Pemecatan Sewenang-Wenang Hakim Konstitusi Terhadap Masa Depan Konstitusi Nasional Indonesia", *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Saldi Isra, "Hubungan Presiden dan DPR", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 3, 2013.
- Sunarto, "Prinsip *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, No. 2, 2016.

Syaihul Hadi, “Keabsahan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Usulan Dewan Perwakilan Rakyat”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 7, No. 4, 2023.

Tundjung Herning Sitabuana, “Upaya Memulihkan Kewibawaan Mahkamah Konstitusi Pasca Tertangkapnya Akil Mochtar”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21, No. 2, 2014.

E. Tesis

Asasuddin Rizki, Tesis, 2015, *Mekanisme Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Oleh Dewan Perwakilan Rakyat*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Wildan Ansori Nasution, Tesis, 2023, *Konstitusionalitas Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.

F. Dokumen Lain

Bundes Verfassungsgesetz – B-VG (Konstitusi Federal Austria)

Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 – VfGG (Constitutional Court Act 1953 atau Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Austria)

Judges’ Disciplinary Act 1868, RGBl. Nr. 46/1868 (Undang-Undang tentang Perlakuan Disiplin Terhadap Pejabat Peradilan dan Pemindahan Paksa Mereka ke Posisi Lain atau Pensiun)

Grundgesetz (Konstitusi Republik Federal Jerman)

Bundesverfassungsgerichtsgesetz – BverfGG (Act on the Federal Constitutional Court atau Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal)

Konstitusi Korea Selatan

Constitutional Court Act No. 18836 (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan)

G. Artikel Website

CNN Indonesia, 2022, “*Alasan DPR Copot Aswanto dari Jabatan Hakim Konstitusi*”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202-32-855230/alasan-dpr-copot-aswanto-dari-jabatan-hakim-konstitusi>, diakses pada tanggal 03 Desember 2024 pukul 14.46 WIB.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2022, “*Sufmi Dasco Tegaskan Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Sesuai Mekanisme*”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42051/t/Sufmi%20Dasco%20Tegaskan%20Pencopotan%20Hakim%20Konstitusi%20Aswanto%20Sesuai%20Mekanisme>, diakses pada tanggal 07 Agustus 2024 pukul 01.10 WIB

Fitria Chusna Farisa, 2022, “*Sosok Aswanto, Hakim MK yang Mendadak Diberhentikan karena Kerap Anulir Produk DPR*”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/01/11284301/sosok-aswanto-hakim-mk-yang-mendadak-diberhentikan-karena-kerap-anulir>, diakses pada tanggal 22 September 2023 pukul 16.54 WIB.

Hidayat Salam, et. all., 2024, “*Revisi UU MK yang Ditolak Publik Belum Berakhir, Dilimpahkan ke DPR 2024-2029*”, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/30/revisi-uu-mk-yang-ditolak-publik-belum-berakhir-dilimpahkan-ke-dpr-2024-2029>, diakses pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 23.45 WIB.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “*Sejarah dan Perkembangan*”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>, diakses pada tanggal 15 September 2023 pukul 13.20 WIB